



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	7 (<i>tujuh</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2020
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019; dan 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto; dan 3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pukul 13.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 27 Agustus 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/08459/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2019 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2021.

II. KESIMPULAN

A. KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perdagangan terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 89,09% atau sebesar Rp3.246.524.101.571 (*Tiga Triliun Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp3.643.998.969.000 (*Tiga Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan mendorong Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perdagangan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (*sembilan*) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perdagangan terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 26 Agustus 2020 sebesar Rp1.570.978.018.704,- (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) dari alokasi Anggaran sebesar Rp2.919.115.968.000,- (*Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau sebesar 53,82% dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

B. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 94,10% atau sebesar Rp904.735.506.509,- (*Sembilan Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp961.432.185.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*Enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (*Enam*) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 25 Agustus 2020 sebesar Rp299.750.829.420,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) dari alokasi Anggaran sebesar Rp649.771.358.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau sebesar 46,13% dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.
5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera melakukan penyerapan Anggaran Tahun 2020, mengingat sampai pada tanggal 25 Agustus 2020, realisasi Anggaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 baru mencapai Rp2.699.750.829.420,- (*Dua Triliun, Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) dari alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp22.664.572.008.000,- (*Dua Puluh Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ribu Rupiah*) atau sebesar 11,91%. Dalam rangka untuk membantu percepatan penyerapan anggaran BPUM Tahun 2020, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan sinergi yang komprehensif dengan instansi terkait serta Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan secara spesifik.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

KETUA RAPAT,

Ttd.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103